

DAMPAK KEBIJAKAN PENGGUNAAN FINGERPRINT DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 RATAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

**EL FITRIA ROMPAS
FLORENCE D. J. LENGKONG
VERY Y. LONDA**

Email : elrompas98@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan penggunaan *fingerprint* di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumenter, dan observasi, Teknik analisis data dalam penelitian digunakan analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *finger print* sebagai mesin absen guru dan pegawai yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan *finger print* disiplin kerja dan dalam upaya mewujudkan pelayanan yang berkualitas di sektor pendidikan menjadi semakin berarti dengan tertatanya waktu operasional sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan dan penggunaan *fingerprint* yang telah meu dan pegawai semakin tepat waktu datang di sekolah dan nanti setelah jam kantor berakhir baru pulang ke rumah tidak diikuti dengan adanya kompensasi dalam bentuk pekerjaan *over time*. Sebab data lapangan menunjukkan bahwa tidak ada tunjangan yang diterima untuk guru & pegawai yang bekerja melebihi jam kerja (uang lembur). Hal ini dianggap perlu untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk merumuskan sebuah kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan guru dan pegawai.

Kata Kunci : Dampak Kebijakan, Fingerprint,

PENDAHULUAN

Mencerdaskan kehidupan bangsa yang termasuk didalamnya seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan yang diharapkan terjadi selain kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran. Oleh karenanya maka Pemerintah Republik Indonesia menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan sampai dengan saat ini. Hal ini sejalan dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan penjelasan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mencapai hal tersebut maka ditetapkan juga prinsip sistem pendidikan nasional sebagaimana Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Pendidikan

diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dalam upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai proses pembelajaran yang mendidik peserta didik maka diperlukannya aspek keteladanan dari pendidik dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Sebab harus diakui bahwa seorang pendidikan yang bersangkutan bukan hanya menjalankan fungsi pengajaran akan tetapi juga menjalankan fungsi mendidik. Sebab dengan mendidik yang benar akan menghasilkan peserta didik yang adalah generasi bangsa yang berkualitas.

Menyikapi hal tersebut diatas maka diperlukannya pendidik yang memiliki kualitas baik dan disertai dengan disiplin dan keteladanan yang terbentuk pada sikap dan perilaku kerja setiap hari. Harus diakui bahwa saat inipun sektor pendidikan tidak luput dari sorotan masyarakat luas tentang pelayanannya. Banyak keluhan yang muncul pada pelayanan pendidikan yang antara lain mengenai disiplin kerja dan kualitas kerja para pendidik atau guru.

Keluhan dalam pelayanan pendidikan ini menjadi penting dimaknai dan diperlukan jalan keluar karena guru saat ini dalam bekerja selain diberikan gaji juga diberikan tunjangan profesi. Kesemuanya ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi sebagai seorang pendidik. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kedisiplinan guru juga masih menjadi permasalahan yang serius sampai dengan saat

ini. Hal yang penting menjadi sorotan yaitu pada kehadiran di sekolah. Guru menghendaki para peserta didik (murid dan siswa) dapat hadir sebelum kegiatan belajar mengajar di mulai. Bahkan tidak setikit juga guru dalam rangka mendisiplinkan murid/siswa terkadang memberikan ganjara bagi murid/siswa yang terlambat hadir di ruang kelas. Guru yang adalah pendidik dan menjadi contoh dan teladan bagi murid/siswa juga dituntut untuk disiplin dalam kehadirannya di sekolah.

Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Dinas Pendidikan telah memberlakukan suatu program disiplin kerja melalui penggunaan *fingerprint*. Fingerprint ini merupakan mesin untuk memberikan data otomatis yang cepat seperti absensi pegawai, akses pintu atau ruangan dengan menggunakan sidik jari. Dengan penerapan dan penggunaan fingerprint akan secara jelas terdata dan tercatat secara sistem kehadiran para guru saat datang dan kembali. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir manipulasi data kehadiran guru dan pegawai yang memiliki keterkaitan dengan pembayaran tunjangan. Juga berkaitan dengan upaya untuk menerapkan disiplin pegawai negeri di lingkup kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Permasalahan kehadiran memang merupakan masalah yang dianggap klasik dan sudah lama terjadi di semua lapisan organisasi pemerintah. Titip tanda tangan atau joki absen memang banyak kali terjadi. Ada pegawai yang tidak hadir akan tetapi dibaut hadir hanya oleh karena kehadirannya dalam bentuk tanda tangan di daftar hadir dilakukan oleh teman kerja. Permasalahan lainnya juga seperti adanya penandatanganan yang dilakukan secara kolektif oleh satu orang, tanda tangan kehadiran dilakukan sekali dalam seminggu atau sebulan serta permasalahan lainnya seperti adanya pegawai yang tidak pernah hadir di tempat kerja akan tetapi karena telah terjadi kesepakatan bersama dengan pimpinan maka dianggap

hadir. Kesemua permasalahan kehadiran diatas merupakan suatu kenyataan yang terjadi dan sangat mengganggu kelancaran kerja termasuk pada sektor pendidikan.

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ratahan yang berlokasi di Desa Liwutung Jaga I Kecamatan Pasan yang juga merupakan bagian dari unit kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara telah menerapkan penggunaan fingerprint bagi guru dan pegawai yang ada. Data menunjukkan bahwa guru yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ratahan berjumlah 17 (tujuh belas) guru tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 3 (tiga) guru honor sekolah, 1 (satu) staf tata usaha dan 1 (satu) Satpam. Kesemua pegawai yang ada telah melakukan perekaman data dan menggunakan fingerprint sebagai absensi kehadiran di sekolah.

Dengan diterapkannya penggunaan fingerprint di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ratahan diharapkan memberikan dampak yang berarti pada penerapan disiplin pegawai dan juga dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Hal ini dianggap penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembelajaran di sekolah juga dalam upaya menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas serta disiplin. Sebagai sebuah program kerja yang telah ditetapkan maka dapat dipahami bahwa penerapan fingerprint di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ratahan merupakan salah satu bagian dari penerapan kebijakan disiplin pegawai sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penerapan kebijakan ini diharapkan memberikan dampak yang baik pada disiplin kerja guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ratahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dye dalam Inu Kencana (2007) mendefinisikan kebijakan negara "... *Is whatever governments choose to do or not to do.*" Selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan negara itu harus meliputi semua "tindakan" pemerintah jadi bukan semata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Adapun konsep kebijakan, beberapa ahli telah mengilustrasikan dalam kalimat berbeda dengan tinjauan objek yang berbeda pula. Friedrich dalam Inu Kencana (2007) mendefinisikan kebijakan sebagai berikut: "... *A proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose.*" Pendapat Friedrich di atas, dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang dari instansi pemerintah, atau kelompok di dalam lingkungannya dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Anderson dalam Islamy, (2001) bahwa kebijakan itu adalah: "*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*". Sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan seorang pelaku atau sekelompok pelaku, guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Raksasataya (dalam Islamy, 2001:17) mengatakan bahwa kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, dengan memuat 3 (tiga) elemen sebagai berikut:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dan berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Penyediaan berbagai masukan untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata.

Tinjauan Tentang Absensi Fingerprint

Absensi atau yang disebut sebagai daftar hadir merupakan salah satu dokumen yang berisikan tentang kehadiran seseorang dalam suatu kegiatan atau kehadirannya di tempat kerja. Dalam penerapannya, absensi ini berkaitan dengan penerapan disiplin oleh instansi atau organisasi kepada setiap pegawai atau anggota. Menurut Heriawanto (dalam Ahmad, 2006:26), pelaksanaan pengisian daftar hadir atau absensi secara manual (hanya berupa buku daftar hadir), akan menjadikan penghambat bagi organisasi untuk memantau kedisiplinan pegawai dalam hal ketepatan waktu kedatangan dan jam pulang pegawai setiap hari. Hal tersebut di khawatirkan akan membuat komitmen pegawai terhadap pekerjaan dan organisasi menjadi berkurang. Berkurangnya komitmen pegawai dalam bekerja akan berdampak pada motivasi dan kinerja pegawai yang semakin menurun.

Cahyana sebagaimana dikutip dalam Ahmad, (2006:26) menyatakan bahwa pencatatan absensi pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Informasi yang mendalam dan terperinci mengenai kehadiran seorang pegawai dapat menentukan prestasi kerja seseorang, gaji atau upah, produktivitas, dan kemajuan instansi atau lembaga umum. Kemudian, pada alat pencatatan absensi pegawai yang konvensional memerlukan banyak intervensi pegawai bagian administrasi sumber daya manusia maupun kejujuran pegawai yang sedang dicatat kehadirannya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2012:4) menjelaskan bahwa desain kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat (Cresswell, 2002:135). Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang dikemukakan sebelumnya yaitu menjelaskan menjelaskan dampak dari kebijakan penggunaan *fingerprint* di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam kajian administrasi publik.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dampak dari kebijakan penggunaan *fingerprint* di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam kajian administrasi publik. Adapun dasar teori yang menjadi pijakan analisis dalam penelitian ini yaitu dampak kebijakan menurut Wibawa dimana terdapat unit sosial yang dapat terkena dampak kebijakan antara lain, dampak terhadap individu ini dapat menyentuh aspek pada dampak psikis, dampak lingkungan, dampak ekonomi dan dampak sosial. Sementara itu dalam penelitian ini hanya difokuskan pada 3 dimensi dampak kebijakan dari Wibawa (1994) yaitu: dampak ekonomi, dampak Sosial dan dampak Lingkungan.

Dampak menurut Samodra Wibawa (1994) yaitu memberikan perhatian yang lebih besar kepada hasil (*output*) dibandingkan kepada proses pelaksanaannya. Ini menjelaskan bahwa ada dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan maksudnya adalah ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Sementara dampak yang tidak diharapkan yaitu dampak yang terjadi setelah kebijakan diterapkan dan keadaan atau situasi tersebut diluar dugaan atau bukan yang diharapkan.

Penggunaan *fingerprint* di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan amanat kebijakan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penerapan kebijakan ini merupakan program kerja dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mewujudkan disiplin waktu kerja bagi Aparatur Sipil Negara termasuk didalamnya guru – guru yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ratahan.

Kebijakan yang adalah sebuah alat yang digunakan oleh pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Sehingga dampak yang diharapkan dari adanya penerapan kebijakan penggunaan *fingerprint* bahwa para guru dan staf pegawai yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ratahan dapat tepat waktu dalam kehadirannya di sekolah sehingga proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik.

Oleh karenanya maka penerapan kebijakan penggunaan *fingerprint* bahwa para guru dan staf pegawai yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ratahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Samodra Wibawa (1994) dapat memberikan dampak yang berarti secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara ekonomi akan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran yang terjadi pada pegawai setelah diberlakukannya *fingerprint* serta dalam kaitannya dengan pembiayaan dan operasional sekolah setelah penggunaan *fingerprint*. Secara sosial berkaitan dengan sikap, hubungan dan perilaku sosial guru setelah diperlakukannya *fingerprint*, dan secara lingkungan Berkaitan dengan pandangan mitra kerja, orang tua dan siswa setelah penggunaan *fingerprint*, serta dalam kaitannya dengan lingkungan belajar mengajar yang terjadi saat ini.

1. Dampak Ekonomi

Penerapan atau penggunaan *fingerprint* sebagai mesin absensi atau daftar hadir bagi guru dan pegawai oleh pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ratahan telah digunakan sejak tahun 2018. Pengadaan dan perawatan mesin *fingerprint* bersumber dari Dana Operasional Sekolah. Jika ditelaah dari fungsi dan peruntukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yakni membiayai komponen kegiatan-kegiatan seperti pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah/rehab. Penggunaan tersebut seharusnya tidak tepat sasaran jika dibandingkan dengan kebutuhan sekolah yang dapat dipenuhi melalui penggunaan dana bantun operasional sekolah. Akan tetapi jika mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dapat disesuaikan dengan Pembiayaan lain yang relevan dalam penggunaan anggaran dalam rangka menunjang operasional administrasi kegiatan sekolah.

Penggunaan mesin *fingerprint*. sebagai alat absensi juga berdampak dalam hal pengeluaran untuk melatih pegawai sekolah sebagai operator mesin *fingerprint*. Pengeluaran inipun dianggap mengganggu penggunaan dana Operasional Sekolah yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan sektor pendidikan. Sebab jika ditelaah lebih dalam bahwa pengadaan barang atau alat seperti ini termasuk dalam bahan yang tidak habis pakai dan merupakan bentuk pembiayaan belanja pembangunan bukan belanja operasional. Sehingga dianggap tidak tepat jika menggunakan dana operasional sekolah.

Hal yang dianggap baik dengan diberlakukannya *fingerprint* sebagai mesin absen bagi guru dan pegawai bahwa sekolah tidak lagi mengganggu biaya foto copy

daftar hadir serta tidak ada lagi pengadaan ATK untuk keperluan daftar hadir. Hal ini secara otomatis menghapus bentuk belanja rutin sekolah setiap bulan. Demikian pula halnya dengan tidak ada pengeluaran yang berarti dari guru maupun pegawai. Akan tetapi yang menjadi sorotan yang dianggap penting untuk dikaji bahwa tidak ada tunjangan sebagai reward untuk pegawai yang dinilai dari kehadiran. Penggunaan *fingerprint* hanyalah sebagai alat pengganti daftar hadir dari yang bersifat manual kepada yang bersifat sistem melalui penggunaan mesin.

Penggunaan *fingerprint* lebih difokuskan pada upaya meningkatkan disiplin waktu kerja khususnya saat datang dan pulang dari Aparatur Sipil Negara. Penekanan pada aspek disiplin lebih diperhatikan dari pada aspek ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan fakta lapangan bahwa guru honor tidak menerima kompensasi atas kehadirannya di sekolah selain gaji. Hal ini berbanding terbalik dengan yang diterima oleh guru yang berstatus PNS dimana Guru dengan status PNS tetap mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Penerapan dan penggunaan *fingerprint* yang telah ada dan pegawai semakin tepat waktu datang di sekolah dan nanti setelah jam kantor berakhir baru pulang ke rumah tidak diikuti dengan adanya kompensasi dalam bentuk pekerjaan over time. Sebab data lapangan menunjukkan bahwa tidak ada tunjangan yang diterima untuk guru & pegawai yang bekerja melebihi jam kerja (uang lembur). Hal ini dianggap perlu untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk merumuskan sebuah kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan guru dan pegawai dari aspek ekonomi.

2. Dampak Sosial

Fakta penelitian yang berkaitan dengan dampak sosial terdeskripsi dalam hal sikap, pola interaksi dan hubungan yang terjadi di antara guru, guru dan pegawai, kepala sekolah dan guru serta pegawai maupun

dengan siswa. Hal yang dianggap bagi secara sosial dengan diterapkannya finger print bahwa Guru dan pegawai semakin tepat waktu hadir di sekolah. Guru dan pegawai yang biasanya nanti datang di sekolah diatas jam 07.00 setelah diperlakukanya finger print mereka telah berada di sekolah paling lambat jam 06.55.

Dalam keberadaan yang dimana telah ada di sekolah sebelum kegiatan belajar dan mengajar dilakukan maka dengan sendirinya akan menjadikan guru lebih memiliki waktu untuk mempersiapkan sarana mengajar sebelum masuk ke kelas. Sehingga dengan sendirinya proses belajar pun menjadi lebih baik. Demikian pula halnya dengan fakta yang menunjukkan bahwa guru dan pegawai tidak pulang kerumah sebelum jam kerja berakhir. Situasi ini juga menjadikan tidak adanya masalah yang berkaitan dengan kehadiran maupun pulang dari guru tersebut.

Hal yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti dari dampak sosial bahwa terdapat kecemburuan diantara sesama guru sebagai akibat dari ada guru yang datang di sekolah tapi tidak masuk kelas (mengajar). Kebosanan karena harus berada di dalam lingkungan sekolah ternyata menjadikan adanya perilaku kurang baik guru di sekolah. Situasi ini perlu diperhatikan oleh kepala sekolah. Sebab dengan metode mengajar yang menyesuaikan dengan jam pelajaran dalam posisi guru mengajar sesuai jadwal pelajaran (guru mata pelajaran) maka akan terjadi penumpukan guru di dalam ruang guru jika mereka tidak ada jam mengajar. Olehnya diperlukannya jalan keluar untuk menghindari konflik yang mudah terjadi dalam situasi yang demikian. Langkah yang perlu dipikirkan seperti ada program kerja yang perlu dilakkan jika guru tidak masuk kelas.

Hal yang juga dianggap baik ditemukan di lapangan bahwa tidak ada lagi guru maupun pegawai yang menitip daftar hadir. Kebiasaan menitip absen atau sering disebut "titip tanda tangan" yang sering

terjadi dalam penggunaan absen manual tidak dapat terjadi dalam situasi demikian. Akan tetapi sekalipun sudah tidak dapat saling membantu dalam menitipkan keharisan, hubungan kekeluargaan tetap berjalan dengan baik antara guru maupun dengan pegawai. Bahkan ada guru yang datang bersamaan secara waktu maupun menggunakan sarana transportasi yang sama. Inilah hal yang dianggap baik dari dampak sosial dari penerapan penggunaan finger print.

3. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan dalam penelitian ini sehubungan dengan penggunaan finger print sebagai mesin absen di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ratahan terpahami dari pandangan orang tua maupun siswa. Penggunaan finger print menjadikan guru semakin tepat waktu masuk kelas. Hal ini berdampak pada waktu belajar yang semakin baik dan tertata sesuai aturan. Sebagaimana dikemukakan oleh siswa saat diwawancara bahwa mereka tidak lagi banyak menunggu guru di dalam kelas. Saat jam pelajaran berlangsung guru sudah berada di dalam kelas.

Sementara itu dari orang tua ditemukan bahwa orang tua siswa tidak merasa kuatir jika anak mereka (siswa) datang lebih awal di sekolah karena sudah ada guru di sekolah. Hal ini terpahami bahwa ada rasa kuatir jika ada siswa yang datang di sekolah sementara belum ada guru yang ada di sekolah. Ketakutan dan kecemasan yang dirasakan oleh orang tua merupakan hal yang wajar jika melihat berbagai peristiwa yang terjadi saat ini. Akan tetapi dengan adanya finger print dan guru harus melakukan absensi sebelum jam 07.00 mengharuskan guru datang di sekolah lebih awal dan tidak lagi seperti dahulu saat masih menggunakan daftar hadir manual.

Perubahan yang terjadi dari aspek lingkungan juga terlihat pada siswa yang lebih dahulu pulang (jam 13.00) dari pada guru dan pegawai (jam 15.00). Sementara itu jika ada kegiatan ekstrakurikuler setelah jam

pelajaran, guru – guru masih berada di sekolah. Keadaan yang demikian menjadikan lingkungan sekolah semakin baik karena secara langsung maupun tidak langsung guru – guru masih berada di sekolah mengawasi dan mendampingi para siswa. Sehingga segala hal yang berhubungan dengan kecemasan orang tua atas anak tidak terjadi lagi.

Penerapan finger print sebagai mesin absen guru dan pegawai yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan finger print disiplin kerja dan dalam upaya mewujudkan pelayanan yang berkualitas di sektor pendidikan menjadi semakin berarti dengan tertatanya waktu operasional sekolah. Lingkungan belajar dan mengajar yang semakin tertata dengan baik dalam hal waktu operasional sekolah setiap hari merupakan dampak yang terlihat dari aspek lingkungan dengan diterapkannya finger print sebagai mesin absien. Demikian pula halnya dengan sudah sangat jarang ditemukan guru berada di luar sekolah pada saat jam kerja semakin menjadikan nama baik sekolah dan guru baik pula.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada desain kualitatif, yakni observasi, wawancara dan studi dokumen. Pengumpulan data ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam upaya menjawab rumusan masalah yang ditentukan sebelumnya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman dalam mengungkapkan menjelaskan dampak dari kebijakan penggunaan *fingerprint* di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam kajian administrasi publik. Sebagaimana dijelaskan dalam Sugiono (2008:246) yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Adapun yang dimaksud dengan *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Aspek Ekonomi : Mengurangi biaya belanja rutin pada pengadaan alat tulis kantor (ATK), menambah biaya pengeluaran yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan dan pemeliharaan mesin *fingerprint*. Tidak adanya uang lembur sebagai reward atas pekerjaan guru dan pegawai yang dilakukan diatas jam kerja kantor sebagaimana tercatat dalam rekaman *fingerprint*, dan tidak ada insentif sebagai kompensasi atas penilaian kehadiran guru honor.
2. Aspek Sosial : Hilangnya kebiasaan menitip kehadiran, semakin disiplin dalam kehadiran (datang dan pulang), terbentuk pola waktu yang sama saat datang di sekolah pagi hari serta terciptanya suasana yang kurang kondusif saat banyaknya guru mata pelajaran yang tidak memiliki jam pelajaran dan hanya berdiam diri di ruang guru.
3. Aspek Lingkungan : Orang tua menjadi tidak kuatir jika siswa data lebih awal di sekolah, waktu belajar mengajar yang semakin tertata dengan baik, tidak ditemukannya guru yang berada di luar sekolah saat jam kerja (pulang lebih dulu).

Saran

1. Perlunya kebijakan yang mengatur tentang pemberian insentif bagi guru PNS dan guru honor yang bekerja melebihi jam kantor.
2. Perlunya penugasan khusus bagi guru yang disaat jam kerja tidak memiliki jadwal pengajar.
3. Tetap dilakukannya pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan disiplin kerja di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2002. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta; KIK Press\
- Islami. I. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta:Bina Aksara.
- Moleong, L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Syafii, I. K. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.

Sumber Lain :

- Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil